

KORUPSI

Kejati Tagih Audit BPK

PLEBURAN—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menagih laporan hasil audit (LHA) kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Saat ini, proses penyidikan kasus ini terhambat gara-gara belum adanya jumlah kerugian negara.

“Sudah dua bulan lalu kami minta audit kerugian negara ke BPK Jateng. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. BPK belum memberikan laporannya kepada kami,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Wilhelmus Lingitubun, Senin (19/8).

Oleh sebab itu berkas penyidikan para tersangka belum dapat diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disusun berkas dakwaan dan penuntutan. “Karena kerugian negara belum diketahui,” tadasnya.

Kasus ini berawal dari Laporan Hasil Akhir (LHA) audit keuangan kota Semarang yang dilakukan BPK. Dalam laporan diperkirakan ada sekitar Rp 3,61 miliar yang menjadi kejanggalan dalam LHA. Hanya saja LHA tidak dapat dijadikan materi penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena audit kerugian negara berbeda dengan Laporan Hasil Akhir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BPK RI Jateng Supriyono Hadi mengatakan, pihaknya sudah menerima permintaan Kejati terkait audit dugaan kasus korupsi PBB Online. “Kami sudah terima permintaan, hasil audit telah selesai tinggal disusun dan diserahkan ke Kejaksaan,” ujarnya. **(dni/jpnn/ton)**